

## Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi

<https://jurnal.feb-umi.id/index.php/ATESTASI>

This Work is Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License



# Pemanfaatan Dana Desa sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Perspektif Keuangan Daerah dalam Pendekatan Interaksi Simbolik Pada Kabupaten Luwu Utara

Frivaldo YesbaRianus Parindingan <sup>(1\*)</sup> Fauziah Sulkanaen <sup>(2)</sup> Diva Rayhanun Raya S <sup>(3)</sup> Alimuddin <sup>(4)</sup>

<sup>(1)</sup> Magister Akuntansi, Universitas Hasanuddin, Makassar

<sup>(2,3,4)</sup> Magister Akuntansi, Universitas Hasanuddin, Makassar

Diterima: Juni 01, 2025 Disetujui: Juni 07, 2025

Tersedia secara online: Juni 08, 2025

Penulis korespondensi: Frivaldo YesbaRianus Parindingan

E-mail addresses: [frivaldo074@gmail.com](mailto:frivaldo074@gmail.com)

	Abstrak
<b>Kata Kunci:</b> Dana Desa; Interaksi Simbolik; Keuangan Daerah; Kesejahteraan Masyarakat.	<b>Tujuan:</b> Penelitian ini bertujuan untuk memahami pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Luwu Utara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari perspektif keuangan daerah, dengan menyoroti dinamika sosial dan makna simbolik yang muncul dalam interaksi antara aparatur desa dan masyarakat. <b>Desain Penelitian dan Metodologi:</b> Menggunakan pendekatan kualitatif dan kerangka interaksionisme simbolik, penelitian ini dilakukan di beberapa desa di Kabupaten Luwu Utara. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, studi dokumen, dan analisis konten. Informan dipilih secara purposif untuk menggali pemaknaan simbolik dalam pengelolaan Dana Desa. <b>Hasil dan Pembahasan:</b> Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis keuangan, tetapi juga oleh proses interaksi sosial, simbol, dan nilai budaya lokal. Musyawarah desa, peran tokoh adat, serta komunikasi verbal dan nonverbal membentuk persepsi masyarakat terhadap integritas dan efektivitas pengelolaan dana. <b>Implikasi:</b> Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas aparatur desa, partisipasi masyarakat, dan pemahaman terhadap konteks sosial budaya lokal. Hasil ini dapat menjadi dasar bagi kebijakan pembangunan desa yang lebih partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta membuka ruang bagi studi lanjutan berbasis pendekatan budaya.
<b>Pernyataan Konflik Kepentingan:</b> Penulis menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan tanpa adanya hubungan komersial atau keuangan yang dapat dianggap sebagai potensi konflik kepentingan.	
<b>Copyright © 2025 Atestasi. All rights reserved.</b>	

## Pendahuluan

Pemerintah daerah di Indonesia merupakan pilar penting dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat 1 UUD 1945, yang menegaskan pembagian wilayah ke dalam provinsi, kabupaten, dan kota, masing-masing dengan otoritasnya sendiri. Dalam konteks ini, Otonomi Daerah menjadi prinsip mendasar yang memungkinkan pemerintah daerah mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat secara mandiri. Konsep ini bertujuan mengoptimalkan pelayanan publik serta menyesuaikan kebijakan dengan

karakteristik lokal. Salah satu bentuk implementasi otonomi tersebut adalah pengalokasian Dana Desa sebagai bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan. Namun demikian, efektivitas pemanfaatan Dana Desa masih menjadi persoalan krusial. Tidak sedikit desa menghadapi hambatan dalam aspek perencanaan, partisipasi, dan pengawasan. Dalam konteks lokal, Kabupaten Luwu Utara yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999, menunjukkan bagaimana aspirasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih baik mendorong proses pemekaran wilayah. Di sisi lain, partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan juga dipengaruhi oleh nilai budaya yang hidup dalam masyarakat itu sendiri, di mana nilai-nilai yang sudah membudaya menjadi pedoman dalam bertindak dan bertingkah laku (Koentjaraningrat, 1985). Dengan konteks sosial-budaya yang khas dan sejarah politik daerah yang panjang, Luwu Utara menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji dinamika pemanfaatan Dana Desa melalui pendekatan interaksionisme simbolik, yang fokus pada perilaku peran, interaksi sosial, dan makna yang dikonstruksi oleh individu dalam praktik keseharian mereka.

Sejumlah studi telah menunjukkan bahwa Dana Desa merupakan kebijakan strategis untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa di Indonesia. Menurut Yamin (2021), Dana Desa ditujukan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, namun implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan, khususnya pada aspek pemberdayaan. Widiyanto et al. (2021) menekankan bahwa kendala utama berkaitan dengan masih tingginya angka kemiskinan, yang menandakan belum optimalnya efektivitas Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan. Untuk mengatasi persoalan ini, pendekatan partisipatif yang berbasis kearifan lokal serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran sangat disarankan. Meski demikian, studi di Kabupaten Minahasa oleh Turere et al. (2018) menunjukkan bahwa Dana Desa mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan dengan implementasi yang mencapai lebih dari 100%. Selanjutnya, Petrichia Ervelyn Lollo et al. (2024) mencatat bahwa walaupun pengelolaan Dana Desa di Desa Mata Air telah mengikuti peraturan dan memenuhi kebutuhan dasar, implementasinya belum optimal karena kendala sumber daya manusia dan politik. Senada dengan itu, Sari & Nurlaila (2024) menemukan bahwa partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan, meskipun pengelolaan secara administratif tergolong baik. Manoppo et al. (2021) juga menyoroti peran Dana Desa dalam menciptakan lapangan kerja dan bantuan langsung selama pandemi COVID-19, tetapi tetap mencatat hambatan seperti keterbatasan dana dan tekanan politik. Penelitian dari Permata & Fauzan (2023) menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yakni peningkatan taraf hidup dan pengurangan pengangguran. Secara umum, temuan-temuan ini memperlihatkan bahwa Dana Desa memiliki potensi besar, namun efektivitasnya sangat bergantung pada pengelolaan yang partisipatif, akuntabel, dan berbasis kebutuhan lokal.

Meskipun berbagai studi telah menelaah implementasi Dana Desa dari aspek ekonomi, administratif, maupun kebijakan publik, terdapat kesenjangan dalam pendekatan teoretis yang digunakan, terutama dalam melihat aspek sosiologis dari pemanfaatannya. Kajian-kajian sebelumnya lebih menitikberatkan pada output fisik dan efektivitas program pembangunan, namun belum banyak yang mengkaji bagaimana proses interaksi sosial, nilai budaya, dan persepsi masyarakat berperan dalam memaknai dan mempengaruhi pemanfaatan Dana Desa. Pendekatan interaksionisme simbolik yang berfokus pada tindakan sosial dan makna yang dibentuk melalui interaksi individu dalam konteks sosial, belum banyak diintegrasikan ke dalam studi mengenai Dana Desa. Padahal, pendekatan ini relevan untuk memahami bagaimana aktor-aktor lokal seperti aparat desa dan warga masyarakat membentuk pemaknaan terhadap peran mereka dalam pembangunan, serta bagaimana simbol, komunikasi, dan nilai-nilai lokal menjadi landasan dalam pengambilan keputusan penggunaan dana. Secara khusus, dalam konteks Kabupaten Luwu Utara yang memiliki sejarah panjang perjuangan pemekaran dan budaya lokal yang kuat, penting untuk menelaah bagaimana konteks ini memengaruhi partisipasi masyarakat dan cara mereka memaknai pengelolaan Dana Desa. Dengan demikian,

terdapat gap antara pendekatan kuantitatif dan dimensi simbolik interaksi sosial dalam studi pemanfaatan Dana Desa yang perlu dijumpai.

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada pemanfaatan pendekatan interaksionisme simbolik untuk mengurai dinamika sosial dalam pengelolaan Dana Desa, khususnya dalam konteks keseharian masyarakat dan aparat desa. Tidak seperti studi-studi sebelumnya yang berfokus pada angka-angka penyerapan anggaran atau indikator keberhasilan fisik, penelitian ini menyoroti makna-makna yang dikonstruksi dalam interaksi sosial antar pelaku desa, mulai dari musyawarah, penyusunan rencana kerja, hingga pelaporan penggunaan dana. Melalui pendekatan ini, penelitian menangkap bagaimana simbol seperti baliho anggaran, forum musyawarah, atau laporan keuangan ditafsirkan dan diberi makna oleh masyarakat sebagai wujud partisipasi atau justru representasi kekuasaan formal. Penelitian ini juga menempatkan kearifan lokal sebagai bagian dari simbol yang hidup dalam praktik pengelolaan, di mana nilai-nilai adat, norma gotong royong, dan relasi sosial menjadi kerangka referensi dalam memahami pengambilan keputusan. Dalam konteks tersebut, pengelolaan Dana Desa tidak dipahami semata sebagai praktik administratif, melainkan sebagai arena sosial tempat negosiasi makna, kepentingan, dan legitimasi berlangsung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana proses simbolik dalam interaksi antar pelaku desa membentuk cara pandang, sikap, dan tindakan kolektif terhadap penggunaan Dana Desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan, serta bagaimana makna tersebut direproduksi atau ditantang dalam ruang sosial desa.

## **Ulasan Literatur**

### *Teori Interaksionisme Simbolik*

Teori Interaksionisme Simbolik merupakan pendekatan dalam sosiologi yang menekankan bahwa interaksi sosial antarindividu berlangsung melalui penggunaan simbol-simbol yang memiliki makna tertentu dan disepakati bersama. Makna-makna ini bukanlah sesuatu yang melekat secara alamiah, melainkan diciptakan dan dinegosiasikan melalui proses interaksi yang berulang (Franzese & Seigler, 2018). Teori ini berakar pada pemikiran George Herbert Mead dan dikembangkan lebih lanjut oleh Herbert Blumer, yang menyatakan bahwa perilaku manusia bukan sekadar respons terhadap stimulus eksternal, melainkan merupakan hasil dari proses penafsiran makna yang berlangsung dalam interaksi sosial (Carter & Lamoreaux, 2023). Dalam konteks ini, simbol bisa berupa bahasa, gestur, objek, atau tindakan tertentu yang mendapatkan arti melalui kesepakatan sosial. Misalnya, ucapan salam atau lambang-lambang dalam ritual budaya tidak semata-mata dilihat dari bentuk fisiknya, tetapi dari makna simbolik yang dilekatkan padanya oleh masyarakat yang menggunakannya (Kotarba, 2021). Oleh karena itu, makna menjadi inti dari proses interaksi, dan interaksi itu sendiri menjadi arena di mana makna-makna terus diproduksi, direvisi, dan disepakati ulang oleh pelaku sosial dalam konteks yang terus berubah. Konsep ini memberikan kerangka pemahaman yang kuat dalam menganalisis bagaimana individu atau kelompok masyarakat merespons dan menyesuaikan diri terhadap kebijakan publik seperti pengelolaan Dana Desa, dengan mempertimbangkan dinamika sosial dan kultural yang melingkupinya.

Dalam kajian kontemporer, teori interaksionisme simbolik terus berkembang dan digunakan untuk memahami berbagai fenomena sosial, termasuk dalam konteks politik, media, hingga pembangunan desa. Misalnya, penelitian oleh Bhattacharya et al. (2024) menyoroti bagaimana simbol-simbol visual dalam kampanye anti-disinformasi politik di media sosial membentuk pemahaman publik terhadap pesan pemerintah, menunjukkan bahwa interpretasi masyarakat terhadap simbol-simbol sangat menentukan efektivitas komunikasi kebijakan. Dalam bidang pembangunan lokal, simbol-simbol seperti papan proyek, forum musyawarah desa, hingga ritual adat dalam pembangunan fisik dapat dimaknai sebagai bentuk partisipasi masyarakat, sekaligus representasi dari kehadiran negara di ruang desa (Chen, 2025). Penelitian oleh Price (2020) bahkan menekankan pentingnya

konteks situasional dalam menentukan bagaimana simbol dimaknai, sebab simbol yang sama bisa memiliki arti berbeda ketika digunakan dalam ruang sosial yang berbeda. Hal ini menegaskan bahwa pemaknaan bukan hanya bersifat individual, tetapi juga sangat kontekstual dan dipengaruhi oleh norma sosial dan budaya lokal. Di sisi lain, dalam konteks masyarakat multikultural seperti Indonesia, simbol-simbol lokal yang hidup dalam nilai budaya dapat menjadi sarana efektif dalam membangun komunikasi dua arah antara pemerintah desa dan masyarakat. Maas et al. (2018) menunjukkan bahwa kelekatan simbol dengan nilai personal maupun kolektif dapat memperkuat keterikatan sosial dan meningkatkan efektivitas kebijakan berbasis komunitas.

### *Pengelolaan Keuangan Daerah*

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan proses kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah, yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Halim, 2013). Proses ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, dalam hal ini kepala daerah yang bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan dan mewakili pemerintah daerah atas kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Esensi pengelolaan keuangan daerah bukan hanya pada aspek administratif semata, tetapi juga pada penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi publik dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip-prinsip tersebut sangat penting untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik (Rulyanti et al., 2017). Dalam praktiknya, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang baik menjadi fondasi utama dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem informasi akuntansi, keterbukaan informasi publik, serta kapasitas kelembagaan daerah. Nor et al. (2019) dalam studi empirisnya menegaskan bahwa pengungkapan laporan keuangan melalui situs web pemerintah daerah di Indonesia masih belum merata, dan kualitas transparansi sangat tergantung pada komitmen kepala daerah serta tekanan politik lokal. Adiputra et al. (2018) menambahkan bahwa transparansi keuangan daerah merupakan instrumen penting dalam mendorong partisipasi masyarakat dan pengawasan publik. Selain itu, dalam konteks pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (BLUD), Arumsari et al. (2024) menemukan bahwa penerapan pola pengelolaan yang fleksibel namun akuntabel dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan. Sumaryana & Siagian (2020) menyoroti pentingnya reformasi dalam sistem pengadaan di desa-desa Indonesia untuk menghindari praktik korupsi dan meningkatkan efisiensi penggunaan dana desa. Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan daerah yang baik juga harus didukung oleh perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat lokal, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan desa. Akuntansi keuangan pemerintah daerah yang akurat dan sesuai dengan standar nasional menjadi kunci dalam menghasilkan informasi keuangan yang dapat dipercaya dan digunakan dalam proses pengambilan keputusan.

### *Desa*

Desa, sebagai kesatuan masyarakat hukum, memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, definisi desa diberikan dengan jelas, menyoroti bahwa desa memiliki batas wilayah serta kewenangan dalam mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Ini mencerminkan prinsip demokrasi lokal yang menekankan inisiatif masyarakat dan pengakuan terhadap hak asal usul serta hak tradisional.

Dalam konteks pendapatan desa, UU No. 6 Tahun 2014 mengatur berbagai sumber pendapatan yang dapat dimanfaatkan oleh desa, sehingga menyediakan landasan keuangan yang lebih kuat untuk pengembangan desa. Beberapa sumber pendapatan tersebut meliputi :

1. Pendapatan Asli Desa (PADes): Ini mencakup berbagai penerimaan dari usaha desa, aset milik desa, partisipasi warga, dan kegiatan gotong royong. Pendapatan ini mencerminkan kemandirian ekonomi desa.
2. Alokasi APBN: Dana yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk mendukung pembangunan desa.
3. Bagian hasil pajak daerah dan retribusi: Semua desa menerima sebagian dari pajak dan retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah, memberikan dukungan tambahan terhadap pendanaan desa.
4. Alokasi Dana Desa: Sebuah dana yang ditujukan khusus untuk desa, yang berasal dari APBN, yang digunakan untuk peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik di desa.
5. Bantuan Keuangan dari APBD: Dukungan finansial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota.
6. Pendapatan desa lainnya yang sah: Sumber pendapatan lain yang legal dan dapat digunakan untuk kepentingan desa.

Pengelolaan sumber pendapatan ini sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan berbagai sumber pendapatan tersebut, desa diharapkan dapat lebih mandiri dan berdaya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta melaksanakan program-program pembangunan yang bermanfaat.

### *Dana Desa*

Dana Desa adalah instrumen penting dalam pembangunan desa di Indonesia, yang dirancang untuk memberdayakan masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup di tingkat desa. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana Desa menjadi salah satu mekanisme pendanaan yang krusial untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Prinsip-Prinsip Dana Desa:

1. Keadilan: Dana Desa diusahakan untuk didistribusikan secara adil, menjangkau semua desa yang ada tanpa memandang ukuran atau kondisi geografis, sehingga semua desa mendapat kesempatan untuk berkembang.
2. Prioritas Kebutuhan: Penggunaan Dana Desa harus berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat setempat, mengidentifikasi masalah yang paling mendesak dan mendapatkan dukungan dari masyarakat.
3. Pemberian Wewenang kepada Desa: Desa diberikan kewenangan untuk mengelola Dana Desa sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan lokal. Ini memberi otonomi kepada desa untuk merancang dan mengimplementasikan program yang sesuai.
4. Penyesuaian dengan Tipologi Desa: Pendanaan dan program yang ditawarkan harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing desa, baik itu dari segi sosial, ekonomi, maupun budaya.

Dana Desa memiliki beberapa tujuan strategis, antara lain :

1. Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa : Dana Desa digunakan untuk memperbaiki infrastruktur dan fasilitas umum, seperti jalan, sekolah, dan kesehatan, yang mendukung pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.
2. Mengembangkan Perekonomian Desa : Dana Desa dapat digunakan untuk mendukung kegiatan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan, pengembangan usaha kecil dan menengah, serta aktivitas ekonomi produktif lainnya.

3. Memperkuat Peran Masyarakat Desa sebagai Subjek Pembangunan : Dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, diharapkan masyarakat tidak hanya sebagai objek, tetapi menjadi aktor utama dalam pembangunan desanya sendiri.
4. Mengurangi Kesenjangan Pembangunan Antar Desa : Dana Desa diharapkan dapat membantu desa-desa tertinggal untuk mempercepat pembangunan, sehingga mengurangi kesenjangan antara desa maju dan tertinggal.

### *Keuangan Desa*

Keuangan desa merupakan seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik desa sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam konteks ini, Dana Desa adalah bagian dari keuangan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan secara langsung ke desa melalui pemerintah kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014. Dana ini dirancang untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan. Namun, agar manfaat Dana Desa dapat maksimal, pengelolannya harus dilakukan secara hati-hati dan berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Masruroh et al. (2022) yang menekankan bahwa pelaksanaan Dana Desa harus mematuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan disiplin anggaran, karena prinsip-prinsip ini merupakan indikator keberhasilan pengelolaan keuangan publik di tingkat desa.

Prinsip pertama, transparansi, sangat penting dalam memastikan penggunaan Dana Desa diketahui dan diawasi oleh masyarakat. Setiap warga desa memiliki hak untuk mengakses informasi mengenai penggunaan Dana Desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban akhir. Penelitian oleh Adiputra et al. (2018) menunjukkan bahwa keterbukaan informasi keuangan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan mencegah potensi penyalahgunaan dana. Dengan transparansi, warga desa dapat memahami bagaimana dan untuk apa Dana Desa digunakan, serta turut memantau jalannya kegiatan pembangunan. Prinsip kedua adalah akuntabilitas, yang berarti bahwa aparatur desa sebagai pengelola dana harus bertanggung jawab terhadap setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Penelitian oleh Alfasadun et al. (2018) menekankan pentingnya akuntabilitas dalam menciptakan kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah desa, karena laporan yang jelas dan tepat waktu merupakan bentuk tanggung jawab terhadap penggunaan dana publik. Hal ini diperkuat oleh temuan Milenia et al. (2023) yang menunjukkan bahwa sistem pelaporan keuangan yang baik secara signifikan meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas program desa.

Partisipasi, sebagai prinsip ketiga, merupakan bentuk keterlibatan aktif masyarakat desa dalam merencanakan dan mengawasi penggunaan Dana Desa. Musyawarah desa menjadi forum penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, menetapkan prioritas pembangunan, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan. Studi oleh Widiyanti (2017) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki korelasi positif terhadap kualitas perencanaan dan ketepatan sasaran program desa. Ketika masyarakat dilibatkan dalam seluruh tahapan siklus anggaran desa, program yang dilaksanakan akan lebih sesuai dengan kebutuhan riil warga. Prinsip keempat adalah disiplin anggaran, yang mengharuskan seluruh pelaksanaan anggaran dilakukan berdasarkan rencana kerja dan anggaran yang telah disepakati bersama. Penggunaan Dana Desa tidak boleh menyimpang dari alokasi yang telah ditentukan kecuali dengan alasan yang kuat dan disertai persetujuan masyarakat. Wahyudi (2017) menegaskan bahwa penerapan disiplin anggaran tidak hanya menciptakan efisiensi penggunaan dana, tetapi juga memperkuat sistem pengawasan dan meminimalkan terjadinya pemborosan atau penyalahgunaan. Selain keempat prinsip utama tersebut, pelatihan dan penguatan kapasitas bagi perangkat desa serta masyarakat sangat penting untuk memastikan seluruh prinsip

dapat diterapkan secara konsisten. Sumiyati & Ichi (2019) menyatakan bahwa pemahaman terhadap sistem akuntansi desa dan manajemen keuangan publik akan membantu aparatur desa dalam menyusun laporan dan perencanaan anggaran yang berkualitas. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip keuangan desa yang baik akan mendorong terciptanya pemerintahan desa yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

### ***Budaya To Ciung Maccae ri Luwu Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah***

Setiap daerah memiliki adat istiadat dan nilai budaya tersendiri, Nilai budaya merupakan sesuatu yang abstrak yang dijadikan pedoman serta prinsip dan bertindak dan bertingkah laku. Keterikatan orang atau kelompok terhadap nilai budaya relatif sangat kuat dan bahkan bersifat emosional. Oleh sebab itu, nilai budaya dapat dilihat sebagai tujuan kehidupan manusia itu sendiri. Bertitik tolak dari pendapat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa setiap individu dalam melaksanakan aktifitas sosialnya selalu berdasarkan serta berpedoman kepada nilai-nilai atau sistem nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat itu sendiri. Nilai yang dimaksud adalah nilai Upacara Sigaruang Telli. Upacara Sigaruang Telli adalah tradisi adat masyarakat Luwu untuk menyelesaikan konflik atau sengketa secara damai. Upacara ini melibatkan lembaga adat sebagai mediator untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih, dengan tujuan menghilangkan dendam dan mengembalikan hubungan persaudaraan.

Upacara ini mencerminkan nilai kebersamaan, keadilan, dan harmoni sosial. Masyarakat Luwu mempercayai bahwa penyelesaian konflik secara damai adalah pedoman penting dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tercipta keseimbangan dan hubungan yang harmonis. Keterikatan emosional terlihat dari keinginan kuat untuk menjaga persaudaraan dan menghindari permusuhan, yang menjadi tujuan hidup bersama dalam komunitas. Tradisi ini menjadi pedoman perilaku sosial, mengatur cara masyarakat menyelesaikan masalah berdasarkan nilai-nilai adat yang hidup di masyarakat Luwu.

### ***Interaksionisme Simbolik***

Interaksionisme simbolik adalah sebuah teori dalam ilmu sosial yang menekankan pentingnya makna dan simbol dalam interaksi sosial. Teori ini berfokus pada bagaimana individu dan kelompok memberikan makna pada pengalaman dan tindakan mereka melalui interaksi dengan orang lain (Haritz, 2020). Beberapa poin penting tentang interaksionisme simbolik adalah sebagai berikut :

#### **1. Makna dan Simbol**

Interaksionisme simbolik berargumen bahwa manusia berinteraksi tidak hanya berdasarkan tindakan fisik semata, tetapi juga melalui makna yang mereka berikan kepada simbol-simbol dalam interaksi tersebut. Simbol dapat berupa kata-kata, gesture, atau objek tertentu yang memiliki arti bagi individu atau kelompok. Misalnya, dalam konteks budaya, kata atau gestur tertentu mungkin memiliki makna khusus yang dipahami oleh anggota kelompok tersebut.

#### **2. Proses Interaksi**

Interaksi merupakan proses timbal balik, di mana individu tidak hanya mengirimkan simbol tetapi juga menerima dan memberi makna terhadap simbol yang diterima. Dalam hal ini, individu terlibat dalam suatu "tari" sosial di mana mereka secara aktif membangun makna dari interaksi mereka. Proses ini mencakup persepsi, penafsiran, dan respons terhadap simbol-simbol yang dihasilkan dan diterima dalam interaksi.

#### **3. Tindakan dan Perilaku**

Sesuai dengan pandangan interaksionisme simbolik, tindakan individu dipengaruhi oleh makna yang mereka pegang. Dalam interaksi sosial sehari-hari, seseorang tidak hanya bertindak berdasarkan stimulus eksternal tetapi juga berdasarkan penilaian dan interpretasi mereka terhadap situasi yang dihadapi. Ini menunjukkan bahwa perilaku individu adalah reaksi terhadap makna yang diberikan dalam konteks sosial tertentu.

#### 4. Kelompok dan Komunitas

Interaksionisme simbolik juga menekankan pentingnya konteks sosial, di mana individu berinteraksi dalam kelompok atau komunitas. Kelompok dapat membentuk dan mengubah makna suatu simbol melalui norma, nilai, dan praktik yang dijalankan. Misalnya, pandangan tentang kebersihan atau kesopanan dapat berbeda antar kelompok, sehingga makna tertentu yang dipegang dalam satu kelompok mungkin tidak sama dengan kelompok lain.

## Desain Penelitian dan Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Moleong (1996) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah, dengan menekankan pada proses interaksi dan komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan objek yang diteliti. Dalam pendekatan ini, keberadaan informan sangat penting. Hubungan antara peneliti dan informan menjadi sangat erat karena melalui informanlah peneliti memperoleh informasi yang mendalam, akurat, dan dapat dipercaya. Tanpa peran informan, data yang diperoleh akan terbatas, sehingga kualitas hasil penelitian pun akan terpengaruh. Pertama, analisis dan pemeriksaan data keuangan yang berkaitan dengan Dana Desa memberikan gambaran kuantitatif tentang alokasi dan penggunaan dana tersebut di tingkat desa. Selanjutnya, wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan langsung dari mereka yang terlibat dalam pengelolaan dana secara praktis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap permasalahan dalam kehidupan sosial, berdasarkan kondisi realitas yang ada di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali makna, pandangan, serta pengalaman subjek dalam konteks sosial tertentu. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan interaksi simbolik. Pendekatan ini digunakan untuk memahami perilaku manusia yang berkaitan dengan perkembangan teknologi komunikasi dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Interaksi simbolik menekankan pentingnya makna yang dibentuk melalui proses interaksi sosial. Untuk mendukung pendekatan tersebut, metode penelitian ini digunakan karena dianggap mampu menggali informasi secara mendalam melalui pengamatan, wawancara, serta keterlibatan langsung peneliti dengan lingkungan sosial yang diteliti. Melalui interaksi simbolik, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih holistik terhadap realitas sosial yang ada di lapangan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam pengelolaan dana desa, serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Luwu Utara.

Dengan Teknik kepustakaan, atau library research, adalah metode penelitian yang menggunakan berbagai sumber informasi yang terdapat di perpustakaan atau media tertulis lainnya, seperti buku, artikel jurnal, dokumen, dan sumber online yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis data dari sumber-sumber tersebut untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Berikut adalah prosedur penelitian secara garis besar yang mengadopsi pendekatan Interaksi Simbolik:

- a. Identifikasi Masalah dan Fokus Penelitian: Peneliti mengidentifikasi fenomena sosial yang ingin diteliti, khususnya interaksi simbolik yang terjadi di dalam suatu kelompok atau organisasi, serta makna yang dibangun oleh para aktor dalam interaksi tersebut.
- b. Pengumpulan Data Awal (Preliminary Study): Subjek penelitian dipilih secara purposif, yaitu individu atau kelompok yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang menjadi fokus penelitian. Peneliti mencari aktor yang memiliki pengalaman atau keterlibatan mendalam.

- c. Pemilihan Partisipan Penelitian (Purposive Sampling): Subjek penelitian dipilih secara purposif, yaitu individu atau kelompok yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang menjadi fokus penelitian. Peneliti mencari aktor yang memiliki pengalaman atau keterlibatan mendalam.
- d. Pengumpulan Data Utama (Observasi dan Wawancara Mendalam): Observasi Partisipatif: Peneliti mengamati langsung interaksi sosial dalam konteks alami, sering kali dengan ikut terlibat secara langsung (immersive observation). Wawancara Mendalam: Digunakan untuk menggali makna subjektif dari tindakan dan simbol yang digunakan oleh para aktor sosial.
- e. Pencatatan dan Dokumentasi Data: Semua hasil observasi, wawancara, dan interaksi dicatat secara rinci, baik dalam bentuk catatan lapangan, transkrip, maupun dokumentasi visual (jika diperlukan).
- f. Analisis Data Secara Kualitatif: Data dianalisis dengan pendekatan interpretatif, menggunakan teknik seperti coding (pemberian kode pada tema-tema utama), kategorisasi, dan pencarian pola makna. Peneliti menafsirkan bagaimana individu membentuk makna melalui simbol dan interaksi sosial.
- g. Refleksi dan Triangulasi: Hasil analisis dibandingkan dengan sumber data lainnya (triangulasi data) dan refleksi peneliti digunakan untuk menghindari bias dan memperkuat validitas temuan.
- h. Penyusunan Temuan Penelitian: Peneliti menyusun narasi hasil penelitian yang menggambarkan interaksi simbolik, makna yang dibentuk, serta dinamika sosial yang terjadi.
- i. Penarikan Kesimpulan dan Implikasi: Kesimpulan dibuat berdasarkan pemahaman mendalam atas makna sosial dan simbolik dari tindakan aktor. Implikasi teoretis dan praktis dijelaskan untuk pengembangan ilmu dan kebijakan (jika relevan).

## Hasil dan Pembahasan

### *Hasil*

Penelitian ini menemukan bahwa pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Luwu Utara tidak hanya merupakan proses teknokratis yang berkaitan dengan anggaran dan pelaporan, melainkan juga merupakan proses sosial yang penuh dengan makna, simbol, dan komunikasi antar pelaku. Melalui pendekatan interaksionisme simbolik, diperoleh beberapa temuan penting :

#### a. **Makna Simbolik dalam Pengelolaan Dana Desa:**

Proses interaksi antara aparat desa dan masyarakat menciptakan makna-makna simbolik terhadap Dana Desa. Misalnya, musyawarah desa bukan hanya wadah formal perencanaan program, tetapi juga simbol partisipasi dan kepercayaan publik. Ketika masyarakat merasa dilibatkan, mereka melihat Dana Desa sebagai milik bersama, bukan sekadar bantuan dari pemerintah pusat.

#### b. **Pengaruh Nilai Budaya Lokal**

Upacara Sigaruang Telli tradisi adat masyarakat Luwu untuk menyelesaikan konflik atau sengketa secara damai, tercermin dalam cara pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Pejabat desa yang memaknai nilai-nilai tersebut secara mendalam cenderung menjalankan pengelolaan dana dengan lebih akuntabel dan transparan.

#### c. **Komunikasi dan Peran Sosial Aktor**

Kepala desa, sekretaris desa, dan anggota BPD memainkan peran penting sebagai aktor simbolik. Gaya komunikasi mereka, baik verbal maupun nonverbal (seperti cara berpakaian, gaya pidato dalam musyawarah, dan penggunaan simbol lokal), turut memengaruhi persepsi masyarakat terhadap keseriusan dan integritas mereka dalam mengelola dana.

#### d. **Konstruksi Kolektif atas Keberhasilan Program**

Keberhasilan program Dana Desa sering kali dinilai bukan hanya dari hasil fisik (misalnya pembangunan jalan atau irigasi), tetapi juga dari persepsi masyarakat terhadap manfaat sosial, ekonomi, dan kebersamaan yang tercipta selama prosesnya. Rasa syukur, gotong royong, dan solidaritas menjadi indikator keberhasilan yang bermakna secara sosial.

**e. Tantangan Nilai dan Globalisasi**

Terdapat indikasi bahwa nilai-nilai lokal mulai terpinggirkan oleh pengaruh budaya luar yang masuk melalui media atau gaya hidup urban. Hal ini dapat memengaruhi cara masyarakat memaknai dana desa, dari semula berbasis kolektivitas menuju orientasi yang lebih individual.

Secara keseluruhan, pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Luwu Utara memperlihatkan bahwa aspek sosial dan budaya sama pentingnya dengan aspek keuangan dan administratif. Optimalisasi dana desa memerlukan pendekatan yang tidak hanya menekankan pada efisiensi anggaran, tetapi juga pada pemahaman makna dan nilai-nilai lokal dalam proses pembangunan.

*Discussion*

Pembahasan mengenai pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Luwu Utara tidak hanya menyoroti aspek teknis dan administratif, tetapi juga menekankan pentingnya dimensi sosial, budaya, dan interaksi simbolik yang terjadi di tingkat desa.

**a. Dana Desa sebagai Instrumen Pembangunan Inklusif**

Dana Desa merupakan instrumen strategis dalam mendukung pembangunan inklusif, pemerataan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat desa. Penyaluran dan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Luwu Utara telah mengikuti prinsip-prinsip keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun, efektivitas pemanfaatan dana sangat bergantung pada kapasitas pengelolaan, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

**b. Makna Simbolik dan Nilai Lokal**

Pendekatan interaksionisme simbolik mengungkap bahwa proses pengelolaan Dana Desa sarat dengan makna simbolik dan komunikasi sosial. Musyawarah desa, misalnya, bukan sekadar forum formal, melainkan simbol partisipasi dan kepercayaan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan dana memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap hasil Pembangunan.

**c. Kinerja Keuangan: Ekonomis, Efektif, dan Efisien**

Analisis kinerja keuangan Dana Desa di beberapa desa di Kabupaten Luwu Utara menunjukkan hasil yang bervariasi :

- Dari sisi ekonomis, pengelolaan Dana Desa tergolong sangat ekonomis, dengan rata-rata rasio ekonomis di atas 100%.
- Namun, dari segi efektivitas, masih terdapat kekurangan, dengan rata-rata efektivitas di bawah 80%, menandakan bahwa realisasi anggaran belum sepenuhnya optimal dalam mencapai tujuan yang diharapkan.
- Dari sisi efisiensi, pengelolaan Dana Desa dinilai sangat efisien, dengan rata-rata efisiensi kurang dari 60%.

Hal ini menandakan bahwa meskipun dana dikelola secara hemat dan efisien, pencapaian tujuan program masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal keterlibatan masyarakat dan penyesuaian program dengan kebutuhan riil desa.

**d. Tantangan Sosial dan Budaya**

Salah satu tantangan utama adalah tergerusnya nilai-nilai budaya lokal akibat pengaruh globalisasi dan budaya luar. Hal ini dapat mengubah orientasi masyarakat dari kolektivitas ke arah individualisme, sehingga mengurangi efektivitas partisipasi dalam pengelolaan Dana desa. Lemahnya sikap kritis masyarakat terhadap nilai-nilai negatif yang masuk juga menjadi

hambatan dalam menjaga kearifan lokal sebagai dasar pendidikan karakter dan tata kelola pemerintahan desa.

**e. Implementasi dan Hambatan**

Implementasi Dana Desa di Kabupaten Luwu Utara telah membawa dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi<sup>26</sup>. Namun, hambatan yang sering muncul meliputi :

- Keterlambatan dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.
- Kurangnya kapasitas aparatur desa dalam perencanaan dan pelaporan.
- Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.
- Tantangan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas secara konsisten.

**f. Peran Komunikasi dan Simbol**

Peran kepala desa, sekretaris desa, dan anggota BPD sangat penting sebagai aktor simbolik. Cara mereka berkomunikasi, baik verbal maupun nonverbal, serta penggunaan simbol-simbol lokal, memengaruhi persepsi masyarakat terhadap integritas dan keseriusan mereka dalam mengelola dana. Keberhasilan program Dana Desa sering diukur bukan hanya dari hasil fisik, tetapi juga dari manfaat sosial, ekonomi, dan kebersamaan yang tercipta.

## **Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Luwu Utara tidak hanya berorientasi pada aspek teknis seperti perencanaan anggaran dan pelaporan keuangan, melainkan juga mencerminkan proses sosial yang sarat akan makna simbolik dan nilai-nilai budaya lokal. Pendekatan interaksionisme simbolik yang digunakan dalam penelitian ini mengungkap bahwa hubungan antara aparatur desa dan masyarakat tidak semata-mata bersifat administratif, tetapi dibangun melalui komunikasi simbolik, partisipasi aktif dalam musyawarah desa, dan pengakuan terhadap praktik adat yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, makna yang terkandung dalam simbol-simbol lokal, sikap para aktor simbolik seperti kepala desa dan perangkatnya, serta persepsi masyarakat terhadap integritas dan komitmen pemimpin desa menjadi elemen penting dalam keberhasilan program. Indikator keberhasilan pun tidak hanya diukur melalui capaian fisik, tetapi juga melalui dampak sosial seperti meningkatnya solidaritas, semangat gotong royong, dan rasa kebersamaan.

Secara ilmiah, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap kajian pengelolaan keuangan desa dengan menghadirkan perspektif baru yang menggabungkan unsur sosial dan simbolik ke dalam analisis kebijakan publik desa. Pendekatan interaksionisme simbolik yang digunakan menawarkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai makna di balik tindakan dan interaksi yang terjadi dalam pengelolaan Dana Desa. Dalam praktiknya, hasil penelitian ini menjadi penting sebagai pijakan bagi pemerintah daerah dan desa untuk merancang kebijakan yang lebih kontekstual, partisipatif, dan berakar pada nilai-nilai lokal. Keunikan penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk melihat pengelolaan Dana Desa tidak hanya sebagai instrumen ekonomi, melainkan sebagai proses kultural yang memerlukan pemahaman terhadap simbol, nilai, dan struktur sosial yang hidup dalam masyarakat desa.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup lokasi penelitian yang hanya berfokus pada satu kabupaten, sehingga generalisasi temuan harus dilakukan secara hati-hati. Selain itu, pendekatan kualitatif yang digunakan memungkinkan eksplorasi mendalam, namun belum mampu menjangkau variasi pengalaman dari wilayah lain yang memiliki karakter budaya dan sosial yang berbeda. Penelitian ini juga belum menggali secara detail pengaruh faktor eksternal seperti kebijakan pusat dan dinamika politik lokal dalam membentuk praktik simbolik pengelolaan dana. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dapat diarahkan pada studi komparatif antar wilayah, penggunaan metode campuran (*mixed methods*), serta fokus pada transformasi nilai lokal dalam konteks modernisasi desa. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi akademisi dan pembuat kebijakan untuk

merancang strategi pengelolaan Dana Desa yang lebih adaptif, holistik, dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat perdesaan.

## Referensi

- Adiputra, I. M. P., Utama, S., & Rossieta, H. (2018). Transparency of local government in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 3(1), 123-138. <https://doi.org/10.1108/AJAR-07-2018-0019>
- Alfasadun, A., Hardiningsih, P., & Srimindarti, C. (2018). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Proceeding SENDI\_U*, 0(0 SE-Articles). <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendiu/article/view/6051>
- Arumsari, P., Alisjahbana, S. M., Rarasati, A. D., & Najid, N. (2024). Triangulation and Delphi method analysis of alternative management scheme for sustainable public-rented flats. *Journal of Facilities Management*, ahead-of-print(ahead-of-print). <https://doi.org/10.1108/JFM-08-2024-0105>
- Ayu Aldira Sari, & Nurlaila Nurlaila. (2024). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Pemberdayaan Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Perk.Pulahan Asahan. *Anggaran: Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(1 SE-Articles), 297-307. <https://doi.org/10.61132/anggaran.v2i1.380>
- Bhattacharya, S., Agarwal, N., & Poudel, D. (2024). Analyzing the impact of symbols in Taiwan's election-related anti-disinformation campaign on TikTok. *Social Network Analysis and Mining*, 14(1), 227. <https://doi.org/10.1007/s13278-024-01385-9>
- Carter, M. J., & Lamoreaux, L. V. (2023). Symbolic Interactionism and Global Public Health BT - *Handbook of Social Sciences and Global Public Health* (P. Liamputtong (ed.); pp. 1-18). Springer International Publishing. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-96778-9\\_39-1](https://doi.org/10.1007/978-3-030-96778-9_39-1)
- Chen, S.-L. . (2025). Essential Methods In Symbolic Interaction. In S.-L. S. Chen (Ed.), *Essential Methods in Symbolic Interaction* (Vol. 60, pp. 187-194). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/S0163-239620250000060010>
- Ervelyn Lollo, P., Tamenno, N., Hewe Tiwu, M. I., & Febiani Angi, Y. (2024). Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang. *Comserva: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(09), 3694-3705. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1170>
- Franzese, A., & Seigler, C. (2018). Symbolic Interactionism BT - *Encyclopedia of Personality and Individual Differences* (V. Zeigler-Hill & T. K. Shackelford (eds.); pp. 1-5). Springer International Publishing. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-28099-8\\_2125-1](https://doi.org/10.1007/978-3-319-28099-8_2125-1)
- Halim, A. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah* (ed. 3) Koran. Penerbit Salemba.
- Haritz, D. (2020). *Teori Interaksionisme Simbolik: Memahami Makna dalam Interaksi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Koentjaraningrat, K. (1985). *Mentalitas dan pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Kotarba, J. A. (2021). Introduction: Interactionist and Qualitative Approaches to Translational Team Science. In N. K. Denzin & S.-L. Sarina Chen (Eds.), *Studies in Symbolic Interaction* (Vol. 53, pp. 3-6). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/S0163-239620210000053001>
- Maas, M. K., Vasilenko, S. A., & Willoughby, B. J. (2018). A dyadic approach to pornography use and relationship satisfaction among heterosexual couples: The role of pornography acceptance and anxious attachment. *The Journal of Sex Research*, 55(6), 772-782. <https://doi.org/10.1080/00224499.2018.1440281>
- Manoppo, E., Kindangen, P., & Rotinsulu, D. C. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* Vol, 22(4). <https://doi.org/10.35794/jpekd.38878.22.4.2021>

- Masruroh, I. M., Muchsin, S., & Suyeno. (2022). Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance ( Studi Kasus di Desa Pesanggrahan , Kota Wisata Batu ) Jurusan Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Administrasi , Universitas Islam Malang Jl . MT Haryono No . 193 , Malang , 65144 , Indonesia Pendahulua. *Jurnal Respon Publik*, 16(2), 53–60.
- Milenia, H. A., Effendy, L., & Nurabiah, N. (2023). Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari). *JAKU (Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja) (E-Journal)*, 7(2 SE-Articles), 67–81. <https://doi.org/10.22437/jaku.v7i2.18494>
- Moleong, L. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif Rosdakarya Bandung*.
- Nor, W., Hudaya, M., & Novriyandana, R. (2019). Financial statements disclosure on Indonesian local government websites. *Asian Journal of Accounting Research*, 4(1), 112–128. <https://doi.org/10.1108/AJAR-06-2019-0043>
- Permata, N. I., & Fauzan, A. (2023). Analisis Pengelolaan Dana Desa Masaran Banyuates Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Islam. *Islamic Economics And Finance Journal* , 1(2 SE-Articles). <https://doi.org/10.62005/iseco.v1i2.17>
- Price, T. (2020). Cognition in situations. *Symbolic Interaction*, 43(4), 692–720. <https://doi.org/10.1002/symb.505>
- Rulyanti, D., Sularso, R. A., & Sayekti, Y. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah desa melalui pengelolaan keuangan desa sebagai variabel intervening. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 11(3), 323–335. <https://core.ac.uk/download/pdf/296602207.pdf>.
- Sumaryana, A., & Siagian, E. S. (2020). Rural Procurement in Indonesia BT - Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance (A. Farazmand (ed.); pp. 1–5). Springer International Publishing. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5\\_4311-1](https://doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5_4311-1)
- Sumiyati, Y., & Ichi, I. (2019). Pemahaman Pengelolaan Keuangan Desa Dan Ketepatan Waktu Pertanggungjawaban Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(01), 89–98. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i1.372>
- Turere, I. R. S., Rotinsulu, D. C., & Walewangko, E. N. (2018). Efektifitas Dana Desa (DD) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(6). <https://doi.org/10.35794/JPEKD.20564.19.6.2018>
- Wahyudi, A. (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa. Skripsi Sarjana Yang Tidak Dipublikasikan, Univeristas Mataram*.
- Widiyanti, A. (2017). *Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa: Studi Pada Desa Sumberejo Dan Desa Kandung Di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*.
- Widiyanto, D., Istiqomah, A., & Yasnanto, Y. (2021). Upaya pemberdayaan masyarakat desa dalam perspektif kesejahteraan ekonomi. *Jurnal Kalacakra: Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(1), 26–33. <https://doi.org/10.31002/KALACAKRA.V2I1.3621>
- Yamin, A. (2021). Penggunaan Dana Desa Yang Partisipatif Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5(2), 246–256. <https://doi.org/10.36312/JISIP.V5I2.1955>